

KOMUNIKASI DIFABEL MELALUI BUKU BACAAN BAGI ANAK-ANAK
THE COMMUNICATION OF DISABLED CHILDREN THROUGH CHILDREN
BOOK READING

Hanny Hafiar
Program Studi Perpustakaan dan Informasi
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Pendidikan Indonesia
Email : hannyhafiar@yahoo.com

Abstract

Disabled people are a subculture that is still experiencing marginalization. There are many human rights belonging to the disabled people who have not yet been met. Marginalization of the disabled people is due to the stigmatization of their disabilities. Stigmatization of the disabled people is triggered by the condition of most people whom still believe traditional model. Lack of public awareness about the reality of the disabled people is caused by the lack of knowledge regarding the actual world of the disabled people. Lack of knowledge from the societies, is due to the lack of literacy reference related to the disabled people which can be accessed by the public. Therefore, it is important to provide literacy to the general society about disabled people, for example through the publication of books. Stereotypes that exist and also flourish in society, is not a phenomenon that appears instantly, but rather a process, and can be propagated from generation to generation. Therefore, as an effort to increase comprehension and knowledge related to the actual life of the disabled people within the society, an acknowledgement towards the reality of the disabled people. Such activity should be employed during early childhood age of children through various types of children's literature. If Indonesian children in their early age's children are aware of and begun to understand the world of the disabled, it is expected that these children would become individuals whom have the ability to appreciate the existence and the limited competence of the disabled people. Thus, gradually, stigmatization of the disabled people in the society today can be gradually corrected. So that Indonesian people, would become an inclusive society for the disabled.

Keywords: *Disabled, Communication, Children, Books.*

Abstrak

Kaum difabel merupakan subkultur yang masih mengalami marginalisasi. Terdapat banyak hak dari kaum difabel yang belum terpenuhi. Marginalisasi terhadap kaum difabel dapat disebabkan adanya stigmatisasi terhadap kemampuan mereka. Stigmatisasi terhadap difabel, dipicu oleh adanya sebagian besar masyarakat yang masih menganut model tradisional. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai realitas kaum difabel

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai dunia kaum difabel yang sebenarnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat ini, salah satunya disebabkan minimnya literasi mengenai kaum difabel yang dapat diakses masyarakat. Oleh karena itu, penting kiranya, untuk menyediakan literasi mengenai kaum difabel bagi masyarakat, misalnya melalui penerbitan buku bacaan. Setiap stereotip yang ada dan berkembang di masyarakat, bukan lah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, namun berproses dan dapat disebarkan secara turun temurun. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai realitas kaum difabel dalam masyarakat, perlu dilakukan pengenalan dunia kaum difabel terhadap anak usia dini melalui berbagai jenis bacaan anak-anak. Apabila sejak dini anak-anak Indonesia sudah mengenal dan mulai memahami dunia kaum difabel, maka diharapkan anak-anak tersebut kelak menjadi individu-individu yang mampu mengapresiasi eksistensi dan kompetensi yang dimiliki oleh kaum difabel. Dengan demikian, lambat laun, stigmatisasi terhadap kaum difabel yang ada dalam masyarakat sekarang ini dapat terkoreksi secara bertahap. sehingga masyarakat Indonesia, mampu menjadi masyarakat yang inklusif bagi kaum difabel.

Kata Kunci: Difabel, Komunikasi, Buku, Anak-Anak.

A. PENDAHULUAN

Stigmatisasi Terhadap Kaum Difabel

Kaum penyandang cacat atau difabel (*different ability*) merupakan kaum yang kerap mendapat labelling sebagai kaum yang memiliki kekurangan sehingga dianggap memiliki ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas tertentu dibandingkan dengan individu yang non difabel. Labelling tersebut juga turut dipicu oleh sebagian kaum difabel yang memiliki harga diri rendah. Hal ini merujuk pada pernyataan yang menyatakan bahwa: "...sikap negatif dari orang-orang 'normal' dan rendahnya harga diri dari penyandang cacat merupakan faktor penentu pandangan tentang apa yang mampu dan tidak mampu

mereka kerjakan" (Coleridge, 1997: 53). Akibatnya kaum difabel sulit mendapatkan apresiasi dan mengukuhkan eksistensinya dalam masyarakat.

Sesungguhnya, bukan hanya masyarakat saja yang "pelit" memberikan apresiasi terhadap kaum difabel. Terdapat beberapa contoh perlakuan dari institusi sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintah, yang menunjukkan kurangnya apresiasi terhadap kemampuan bahkan keberadaan kaum difabel. Misalnya, entah disadari atau tidak, banyak institusi yang mendirikan bangunan berupa gedung yang tidak memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas kaum difabel. Padahal, hak aksesibilitas kaum difabel telah dijamin undang-undang tentang difabel no 4 tahun

1997 pasal 6 yang menegaskan bahwa, setiap penyandang cacat berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Isi undang-undang tersebut diperkuat oleh pasal 10 ayat 2 yang berbunyi: "...penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang cacat agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat. Kenyataannya, masih banyak bangunan yang didirikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kaum difabel namun tidak mendapat sanksi yang optimal. Hal ini merujuk pada realitas bahwa gedung-gedung tersebut tetap tidak menyediakan akses bagi kaum difabel, dengan alasan menambah biaya pembuatan dan perawatan.

Ketidakpatuhan tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh para pemilik gedung. Para pemilik usaha yang memiliki ribuan karyawan pun, melakukan pelanggaran undang-undang. Sesungguhnya, merujuk pada UU no 4 tahun 1997 pasal 6 poin 2 mengenai lapangan kerja bagi kaum difabel, dinyatakan bahwa "...setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Artinya, kaum difabel berhak untuk mendapatkan pekerjaan di sektor

formal sebagai karyawan yang dipekerjakan pada bidang tertentu yang disesuaikan dengan kondisinya.

Selain itu, masih dalam nomor undang-undang yang sama, disebutkan bahwa: "...perusahaan wajib memberikan alokasi lowongan kerja minimal 1% untuk penyandang cacat". Namun, pada kenyataannya, masih banyak perusahaan yang enggan mempekerjakan individu yang difabel, dikarenakan adanya kekhawatiran karyawan difabel malah memberikan beban tambahan pada perusahaan. Dengan demikian, kaum difabel mengalami kendala dalam mengakses sektor formal karena adanya stereotip masyarakat bahwa difabel tidak mampu bekerja di sektor formal (Demartoto, 2005: 233)

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, undang-undang adalah peraturan yang harus dipatuhi serta memiliki sanksi yang telah terstandarisasi bagi para pelanggarnya. Namun jika pelanggaran tersebut tetap berlanjut tanpa adanya upaya perbaikan yang signifikan, artinya sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera pada para pelanggarnya. Oleh karena itu, upaya penegakkan undang-undang yang mengatur hak kaum difabel belum ditegakkan secara optimal oleh pemerintah.

Sesungguhnya, ketidakpedulian berbagai pihak terhadap hak kaum difabel, dilatarbelakangi oleh adanya labeling terhadap kaum difabel itu sendiri. Dengan adanya berbagai perbedaan kondisi dan keberfungsian anggota tubuh dari kaum difabel, membuat masyarakat beranggapan bahwa kaum difabel merupakan kaum yang memiliki kekurangan sehingga dianggap tidak dapat memberikan sumbangsih pada masyarakat. Berdasarkan anggapan ini pula lah pada akhirnya muncul pemikiran bahwa kebutuhan kaum difabel akan berbagai hal merupakan kebutuhan yang ditempatkan setelah kebutuhan kaum non difabel. Apalagi jika dikaitkan dengan adanya kendala dana yang menjadi masalah klasik bagi pembangunan di Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sehingga, ketersediaan dana bagi rehabilitasi dan aksesibilitas bagi difabel hanya sebesar 5% dari total anggaran nasional (Adinda, 2010: 79).

Konsep labelling yang menganggap kaum difabel sebagai kaum yang tidak berkemampuan ini biasanya muncul dari masyarakat yang menganut model tradisional. Tidak seperti masyarakat dengan model sosial yang menganggap kaum difabel sebagai kaum yang memiliki kemampuan berbeda dengan non

difabel, sehingga kaum difabel dianggap setara dalam urusan hak dan kewajiban, masyarakat dengan model tradisional cenderung masih sulit untuk menerima konsep kesetaraan bagi kaum difabel. Hal ini disebabkan karena masyarakat model tradisional menganggap bahwa kecacatan yang dialami oleh kaum difabel dianggap sebagai hukuman dari Tuhan atau kutukan dari para leluhur akibat dosa di masa kehidupan yang lalu, sehingga masyarakat tersebut merasa bahwa pengabaian dan pengucilan terhadap kaum difabel merupakan hal yang dapat dianggap wajar (Coleridge, 1997: 95-97).

Pemahaman masyarakat mengenai kaum difabel, diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menyebabkan kaum difabel tetap mendapatkan labeling yang tidak menguntungkan, berupa stigmatisasi terhadap kemampuan mereka yang dianggap berada di bawah kemampuan kaum non difabel yang memang merupakan mayoritas dalam masyarakat. Hal ini lah yang rasanya perlu dicermati dan dipikirkan solusinya.

B. PEMBAHASAN

1. Komunikasi Difabel Melalui Buku Bacaan Bagi Anak-anak

Difabilitas bukan merupakan pilihan, namun

merupakan suatu kondisi yang harus diterima baik oleh pihak yang mengalaminya, maupun oleh lingkungannya. Proses penerimaan terhadap kondisi kecacatan merupakan langkah awal yang dapat dilakukan oleh kaum difabel dan masyarakat secara umum. Proses ini harus dilakukan secara sinergis. Di satu sisi, kaum difabel harus mau dan mampu membuktikan diri bahwa mereka tidak layak mendapatkan labeling dan diskriminasi yang selama ini mereka terima, melalui kontribusi dan sumbangsih yang nyata pada pembangunan. Di sisi yang lain, masyarakat baik individu maupun institusi sudah selayaknya membuka mata terhadap realitas kaum difabel yang berada di tengah-tengah mereka.

Artinya, upaya meningkatkan pemahaman mengenai difabel menjadi tugas bersama. Salah satu pihak yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kaum difabel adalah kalangan penulis dan penerbit. Hal ini dikarenakan upaya peningkatan pemahaman mengenai kaum difabel dapat dilakukan secara efektif melalui kegiatan komunikasi. Komunikasi yang dapat dilakukan oleh penulis dan

penerbit adalah komunikasi bermedia dalam bentuk buku.

Mengacu pada pepatah bahwa buku adalah jendela ilmu, maka melalui buku pula lah kita dapat memahami berbagai realitas yang ada di dunia, termasuk realitas kaum difabel. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dan kepedulian dari para penulis untuk mulai mengangkat realitas kaum difabel sebagai tema yang mengandung pesan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kaum difabel dalam karya-karyanya. Terutama bagi para penulis buku untuk anak-anak. Hal ini disebabkan pemahaman mengenai nilai-nilai moral, etika dan kemasyarakatan dapat ditanamkan melalui bacaan yang dikonsumsi sejak anak-anak. Selain itu, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa: "...masyarakat sebaiknya memberikan pendidikan dini pada anak-anak untuk dapat menghargai perbedaan kemampuan yang dimiliki kaum difabel dan non difabel, agar stigmatisasi terhadap penyandang cacat secara bertahap dapat dihilangkan" (Hafiar, 2011: 181).

Namun, kepedulian dari masyarakat kalangan penulis ini juga tidak akan efektif jika tanpa

dukungan dari pihak penerbit. Sesungguhnya, bukan merupakan hal yang tabu bila penerbit hanya bersedia menerbitkan buku-buku yang dianggap akan memiliki nilai komersial. Namun, patut diingat bahwa visi misi setiap penerbit pasti diawali oleh suatu idealisme yang bermuara pada pemberdayaan masyarakat. Dan kaum difabel merupakan sub kultur yang tidak dapat dipungkiri merupakan bagian dari masyarakat yang memerlukan pemberdayaan.

Selain faktor komersialisasi, kendala lain yang biasanya dikemukakan pihak penerbit adalah faktor kekhawatiran adanya isi buku yang akan dianggap sensitif oleh kaum difabel. Untuk masalah tersebut, sesungguhnya dapat dicarikan solusinya melalui konsultasi dengan lembaga-lembaga difabel yang memahami kondisi kaum difabel secara lebih mendalam. Sehingga pihak-pihak tersebut dapat memberikan saran dan pendapat pada proses editing naskah maupun gambar untuk mengantisipasi kesalahpahaman. Sesungguhnya, akhirnya ini, jika dicermati, perkembangan buku-buku bacaan bagi anak-anak menunjukkan perkembangan yang menggem-

birakan. Berbagai judul dan jenis buku bagi anak-anak dipajang secara menarik di toko-toko buku di kota-kota besar, untuk menstimulasi minat anak-anak untuk membeli dan membacanya. Tema-tema yang diusung dalam buku-buku anak-anak, kebanyakan berisi mengenai nilai-nilai dasar. Hal ini memberikan gambaran bahwa kalangan penulis dan penerbit menyadari adanya kebutuhan yang tinggi dari masyarakat akan bacaan yang dapat membantu orang tua dalam menanamkan nilai-nilai tertentu pada anak-anaknya.

Hal tersebut sekaligus menyajikan peluang bahwa penanaman pemahaman mengenai kaum difabel dan nilai-nilai etika dalam berinteraksi dengan kaum difabel dapat dilakukan melalui media buku bacaan anak-anak. Adapun jenis bacaan bagi anak, dapat disesuaikan dengan karakteristik anak pada setiap fase perkembangannya. Bagi anak usia 2-7 tahun dapat digunakan bacaan berupa cer-gam (cerita bergambar) yang menyajikan tulisan disertai gambar-gambar relevan, dikemas dengan warna-warna yang akan menarik perhatian anak-anak, mengingat usia 2-7 tahun merupakan anak yang berada

dalam masa esthetis (Ahmadi, 1991: 42).

Sedangkan untuk anak-anak usia 8-12 tahun dapat digunakan buku yang bergenre teenlit (*teenage literature*). Akan lebih menarik lagi jika buku bacaan yang mengusung tema pemberdayaan kaum difabel tersebut masih merupakan karya anak. Mengingat sekarang ini tengah booming fenomena KKPK (Kecil-kecil Punya Karya) di kalangan penerbit.

Selain faktor buku sebagai media komunikasi yang digunakan dan faktor anak-anak sebagai komunikan sasaran yang dituju. Hal lain yang patut dipertimbangkan dalam pembuatan buku bacaan bagi anak yang mengangkat tema mengenai kaum difabel adalah faktor isi pesan. Perlu diingat bahwa setiap subkultur memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, jika penulis sebagai komunikator, bermaksud mengangkat tema kaum difabel, maka diperlukan pemahaman mengenai kaum tersebut melalui proses pendekatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diusung dalam bacaan.

2. Tahapan Menuju Masyarakat Inklusi Bagi Difabel

Unsur penting yang patut diperhatikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kaum difabel melalui penerbitan buku bacaan bagi anak adalah faktor orang tua dari anak-anak yang menjadi komunikan sasaran. Tak dapat dipungkiri, walaupun target sasarannya adalah anak-anak, namun biasanya orang tua lah yang mengarahkan, memilih bahkan membelikan bacaan yang dianggap sesuai bagi anak-anaknya. Terlebih, kebiasaan membaca yang dilakukan anak-anak, cenderung dipengaruhi budaya membaca yang diinternalisasi oleh anak dalam keluarganya, melalui komunikasi keluarga. Oleh karena itu perlu dilakukan pertimbangan yang matang dalam melakukan pemetaan baik secara demografis dan psikografis mengenai karakteristik orang tua dari anak-anak yang dijadikan komunikan sasaran.

Jika faktor-faktor tersebut telah dipersiapkan secara matang, maka harapan untuk mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kaum difabel melalui buku bacaan anak-anak dapat secara bertahap terwujud menjadi hal yang nyata. Dengan demikian, apabila anak-anak sudah memahami dunia kaum difabel

melalui buku-buku bacaan yang mengangkat nilai-nilai positif, seperti prestasi kaum difabel, maka diharapkan sedikit demi sedikit, mereka akan belajar mengapresiasi eksistensi dan kontribusi kaum difabel dalam masyarakat. Sehingga, harapan kaum difabel untuk dapat berdiri setara dengan kaum non difabel dapat terwujud.

Patut disadari bahwa proses penanaman nilai-nilai bukan lah sebuah proses yang akan memberikan hasil yang instan. Terdapat banyak tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Namun, apabila upaya penanaman kesadaran ini dilakukan secara intensif dan berkesinambungan maka bukan mustahil jika dalam 20 tahun ke depan, masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang sepenuhnya inklusif bagi kaum difabel.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, Triana. 2010. *Menggugat kebijakan dan Pengadaan Fasilitas Umum untuk Difabel*. Jakarta: Jurnal Perempuan. Edisi 65.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Coleridge, Peter. 1997. *Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Demartoto, Argyo. 2005. *Analisa Gender mengenai Pembagian Kerja, Akses, dan Kontrol Terhadap Sumber Daya Ekonomi dalam Keluarga Difabel di kota Surakarta*. Yogyakarta: UGM
- Hafiar, Hanny. 2012. *Problematika Atlet penyandang Cacat: Studi Komunikasi mengenai Kompleksitas Komunikasi Atlet Penyandang Cacat Berprestasi*. Bandung: Unpad Press.
